



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021**



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 dapat diselesaikan.

LKjIP ini mempunyai makna yang sangat penting sebagai suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah. Selain itu LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis suatu organisasi kepada pemberi wewenang dan mandat untuk menjalankan kegiatan dan penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten Magelang termasuk peran Sekretariat Daerah dan dukungan serta partisipasi masyarakat dan berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikan sumbangsuhnya untuk kemajuan Kabupaten Magelang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja guna perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19660304 199203 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2021. Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang telah menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yang dilaksanakan oleh 9 (sembilan) bagian yang ada di Sekretariat Daerah.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 telah mencapai 101% (*Sangat Tinggi*) dibandingkan dengan target tahun 2024 pada akhir periode Renstra dengan capaian 96,07 (*Sangat Tinggi*). Pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang didukung 4 program dengan jumlah anggaran Rp 36.638.355.102,00 realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran strategis sebesar Rp 34.592.625.496,00 (94,42%), persentase realisasi keuangan masuk dalam katagori *sangat tinggi*.

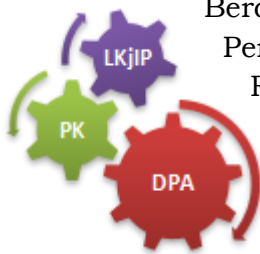
Efisiensi capaian kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen), tetapi tingkat efisiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Aspek Strategi Organisasi	2
E. Permasalahan Utama Organisasi	7
F. Sistematika	8
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021	16
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
D. Prestasi	20
BAB IV : PENUTUP	21
LAMPIRAN	23

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

LKjIP Tahun 2021 yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Letak Geografi
 - 3. Pembagian Wilayah Organisasi
 - 4. Organisasi Perangkat Daerah
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

- Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
 8. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;
 10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Magelang tahun 2005–2025 dengan Visi RPJP Kabupaten Magelang adalah : “Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera dan Madani”. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan memperhatikan

situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan Kabupaten Magelang, dan memperhitungkan kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka ditetapkan moto pembangunan Kabupaten Magelang yaitu “**Gemah Ripah Iman Cemerlang**” disingkat “**Gemilang**”.

Dalam mewujudkan visi RPJPD maka ditetapkan visi Pembangunan Kabupaten Magelang untuk Tahun 2019 - 2024 adalah: **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah(Sedaya Amanah)**. Visi Kepala Daerah tersebut menjadi Visi yang harus diemban oleh setiap PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

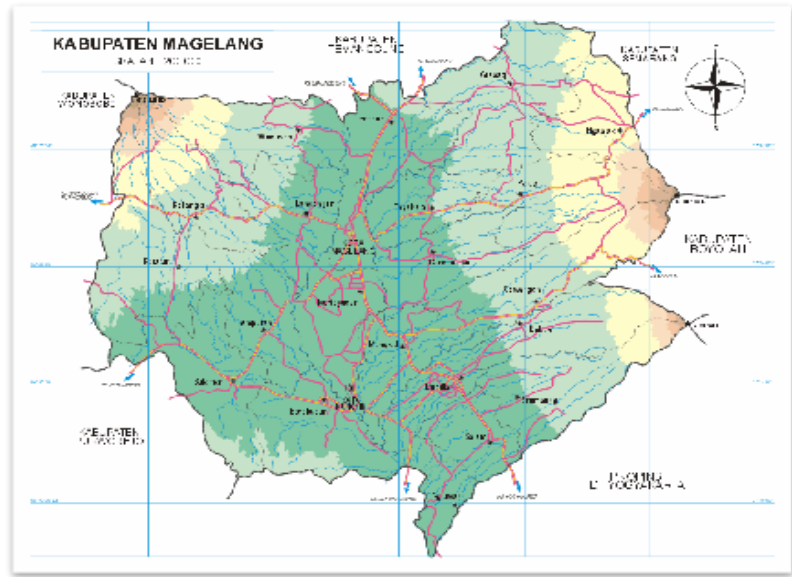
Titik berat pada Sekretariat Daerah adalah menjalankan visi AMANAH dalam visi Bupati Magelang, konsep amanah secara garis besar adalah menciptakan kerja sama yang baik dengan semua elemen masyarakat. Amanah merupakan kunci kemakmuran masyarakat yang menjadi perekat sosial yang mampu membentuk solidaritas dan jaringan antara lapisan masyarakat. Amanah harus memberikan inisiatif konsep moral, variatif, argumentatif yang bermanfaat dan aktual bagi kehidupan manusia mencakup aspek agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya, sehingga dapat diwujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakkan amanah (*high trust society*). Amanah mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran. Visi Amanah akan dicapai dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis, serta meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Terdapat 3 misi sebagai penjabaran visi Bupati Magelang dimana Sekretariat Daerah menjalankan misi Bupati Magelang yang ke 3, yaitu “Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang amanah” dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas kebijakan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik kesekretariatan daerah”. Dengan kata lain Sekretariat Daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan Kabupaten Magelang dengan kewajiban mengemban, melaksanakan dan mendukung misi Kepala Daerah untuk mewujudkan visi yang telah dicita-citakan.

2. Letak Geografis

Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, berada tepat di pusat ibukota Kabupaten Magelang yaitu di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Kecamatan Mungkid dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara 110° – 01' - 51" Bujur Timur, 110° – 26' - 58" Bujur Timur, 7° - 19' - 13" Lintang Selatan dan 7° - 42' - 16" Lintang Selatan.

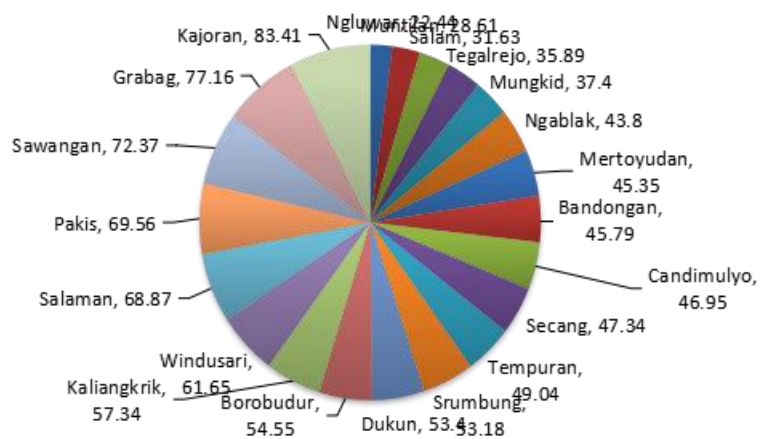
Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.



Peta Kabupaten Magelang

Selain berbatasan dengan 5 kabupaten dan 1 daerah istimewa di sebelah utara, selatan, timur dan barat Kabupaten Magelang juga berbatasan dengan Kota Magelang yang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang.

Luas Wilayah Menurut Kecamatan (km²) di Kabupaten Magelang



3. Pembagian Wilayah Administrasi

Kabupaten Magelang secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih 1.085,73 km² (108.573 hektar) atau kurang lebih 3,34% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Magelang yang paling luas yaitu Kecamatan Kajoran sebesar 83,41 kilometer persegi. Sedangkan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu Kecamatan Ngluwar sebesar 22,44 kilometer persegi, secara rinci dapat dilihat pada diatas.

4. Organisasi Perangkat Daerah

a. Dasar Hukum Organisasi

Dasar hukum pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

b. Tugas dan Fungsi Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, tugas dan fungsi Sekretariat daerah adalah :

1) Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2) Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

- a) Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;
- b) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- c) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d) Pelayanan administratif, data, dan informasi kesekretariatan daerah;
- e) Pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;
- f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- g) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Daerah;
- h) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

1) Sekretaris Daerah;

2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

a) Bagian Pemerintahan, membawahi:

- Subbagian Administrasi Pemerintahan;
- Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
- Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.

- b) Bagian Hukum, membawahi:
 - Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 - Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - Subbagian Dokumentasi, Informasi, Evaluasi Hukum.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - Subbagian Bina Mental Spiritual
 - Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
- a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD
 - Subbagian Perekonomian; dan
 - Subbagian Sumber Daya Alam.
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - Subbagian Penyusunan Program;
 - Subbagian Pengendalian Program; dan
 - Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 - Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- 4) Asisten Administrasi Umum, membawahi:
- a) Bagian Organisasi, membawahi:
 - Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksanaan; dan
 - Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - b) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - Subbagian Protokol
 - Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
 - c) Bagian Umum, membawahi:
 - Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Struktur organisasi secara lengkap terlampir

d. Sumber Daya Manusia Aparatur

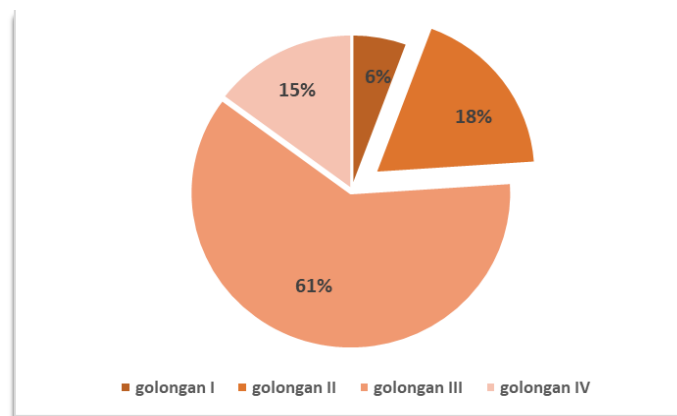
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sampai dengan akhir Desember 2021 sebanyak 142 orang. Secara rinci data PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sekretaris Daerah	1	0	1
2	Asisten	3	0	3
3	Staf Ahli	1	0	1
4	Bagian Pemerintahan	7	3	10
5	Bagian Hukum	2	10	12
6	Bagian Perekonomian dan SDA	4	2	6
7	Bagian Administrasi Pembangunan	2	6	8
8	Bagian Pengadaan Barang Jasa	19	12	31
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8	2	10
10	Bagian Organisasi	4	3	7
11	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	6	12
12	Bagian Umum	23	18	41
Jumlah :		80	64	142

Sumber : Aplikasi Statistik BKPPD Kabupaten Magelang, Desember 2021

Grafik Komposisi PNS Sekretariat Daerah Menurut Golongan Tahun 2021



Sumber : Aplikasi Statistik BKPPD Kabupaten Magelang, Desember 2021

E. Permasalahan Utama Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Masih dibutuhkannya Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya sehingga mampu bersikap dan bertindak responsif terhadap seluruh kebijakan dari pemerintah pusat yang membutuhkan tindak lanjut peraturan di daerah.
2. Tindaklanjut peraturan teknis atas peraturan perundang-undangan yang baru masih sering terlambat yang mengakibatkan terlambatnya pengaturan di daerah.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang belum sempurna, sehingga masih ditemukan tugas dan fungsi PD yang tumpang tindih yang berdampak pada kesalahan pola koordinasi, tugas dan fungsi yang terlewatkan, serta ditemukannya beban kerja yang berlebih.
4. Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai tugas dan fungsi masing-masing PD.

F. Sistematika

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini diuraikan anggaran jumlah dan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja 2021.

C. Prestasi

Sub Bab ini diuraikan prestasi yang diraih selama kurun waktu 2021.

BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran berisikan data pendukung berupa Struktur organisasi dan Realisasi Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang berdasarkan APBD Perubahan tahun anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun anggaran 2021
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.	72,50 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik kesekretariatan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,00

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah tahun 2021.

Pada Penetapan Perubahan Kinerja tahun 2021 Sekretariat Daerah dalam melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebanyak 2 indikator kinerja. Untuk melaksanakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator kinerja maka dianggarkan program-program sebagai berikut :

Tabel 2.2.
 Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan
 Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021
 Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

No	Program	Pagu
1	2	3
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	18,859,776,390.00
2	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	7,164,723,954.00
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	11,121,900.00
Sub Jumlah (Belanja Non Eks BAU) :		26,035,622,244
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Jumlah (Belanja Eks BAU Non Gaji dan Tunjangan ASN) :	10,602,732,858
Jumlah :		36,638,355,102

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah tahun 2021.

Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2021 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebanyak 4 Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp 36.638.355.102,00 (Tiga puluh enam milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus dua rupiah) diluar anggaran gaji dan tunjangan ASN Sekretariat Daerah. Secara detail indikator kinerja dan penganggaran terinci pada Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Semua Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang bersumberkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2021, dan tidak terdapat anggaran yang bersumber pada APBN dan BLN.

Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tiap sasaran strategis, maka dilakukan pemetaan program dan anggaran per sasaran strategis Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2021
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.	72,50	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	18,859,776,390.00	51.48
				Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	7,164,723,954.00	19.56
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	11,121,900.00	0.03
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik kesekretariatan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,602,732,858	28.94
Jumlah :					36,638,355,102	100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dukungan pendanaan dalam mencapai sasaran strategis untuk mencapai target dari tiap indikator kinerja sasaran strategis.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang untuk tahun 2021. Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 pada anggaran perubahan dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis indikator, yaitu : *indikator positif* dan *indikator negatif*, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- *Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:*

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

AKUNTABILITAS KINERJA


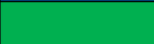



- A. Pengukuran Kinerja Organisasi.
- B. Analisis dan Evaluasi Kinerja 2021

- *Indikator Negatif* apabila semakin tinggi tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, pemberian warna untuk mempermudah dalam membaca kriteria penilaian

2. Capaian Kinerja Sasaran

Persentase capaian kinerja per sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2021, dan membandingkan capaian kinerja sasaran pada tahun sebelumnya, serta membandingkan antara realisasi kinerja per sasaran tahun 2021 dengan akhir periode Renstra Sekretariat Daerah pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian terhadap 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.	70.00	72.5	74.50	103%	80.00	93.1%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik kesekretariatan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83.77	84.00	84.16	100%	85.00	99.0%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis :						101%		96.07%

Sumber : Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2021

Berdasarkan tabel 3.2 rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 sebesar 101% (sangat tinggi) dibandingkan dengan target tahun 2024 pada akhir periode Renstra capaian sebesar 96,07% (*Sangat Tinggi*) maka capaian tahun 2021 tidak terlalu jauh dari capaian akhir Renstra tahun 2024 dengan selisih sebesar 3,94%.

3. Realisasi Keuangan Tahun 2021

Realisasi keuangan untuk mencapai target indikator pada sasaran strategis pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran per Program
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	18,859,776,390.00	18,470,707,589	97.94
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	7,164,723,954.00	6,515,933,779	90.94
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	11,121,900.00	11,060,700	99.45

No	Program	Pagu	Realisasi	%
Sub Jumlah (Belanja Non Eks BAU) :		26,035,622,244	24,997,702,068	96.01
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,602,732,858	9,594,923,428	90.49
Sub Jumlah (Belanja Eks BAU diluar Gaji dan Tunjangan ASN)		10,602,732,858	9,594,923,428	90.49
Jumlah :		36,638,355,102	34,592,625,496	94.42

Sumber : SIPKD Kabupaten Magelang 2021

Dalam pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang didukung 4 program dengan jumlah anggaran Rp 36.638.355.102,00 (Tiga puluh enam milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus dua rupiah) realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran strategis sebesar Rp 34.592.625.496,00 (Tiga puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 94,42%, persentase realisasi keuangan masuk dalam katagori *Sangat tinggi*, dengan capaian tertinggi terdapat pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 97,94% dan capaian terendah terdapat pada Program Perekonomian dan Pembangunan serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90,49%, sehingga realisasi anggaran tersebut masuk dalam katagori *tinggi*.

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian 99,45% namun program tersebut bukan merupakan program pendukung sasaran strategis Sekretariat Daerah dikarenakan merupakan tugas dan fungsi pada PD Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2021 terhadap 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh sembilan bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Penetapan Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2019-2024. LKjIP ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun kedua dari Renstra Sekretariat Daerah 2019-2024.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pelaporan kinerja dipilah-pilah

berdasarkan sasaran strategis, dimana pencapaian kinerja seluruh sasaran strategis tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah

Tabel 3.5
Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian terhadap 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3		5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.	70.00	72.50	74.50	103	80.00	93.1

Sumber : Bagian adminbang Sekretariat Daerah tahun 2021, data diolah

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 103% (*Sangat tinggi*) sedangkan capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2024 sebesar 93.10% (*Sangat Tinggi*).

Penunjang keberhasilan : tingginya capaian kinerja pada program Penyelenggaraan dan Kesejahteraan Rakyat pada indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun tepat asas, Persentase produk hukum Pemerintahan daerah yang dikaji sesuai asas dan indikator Persentase permasalahan hukum yang didampingi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 119,35%, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat sehingga berdampak pada perubahan/penyesuaian regulasi ditingkat pemerintah daerah.

Permasalahan: permasalahan yang terkait kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan antara lain:

1. Dokumen perencanaan lima tahunan/Rencana Strategis mengalami perubahan berkaitan dengan terbitnya Permendagri nomor 90 tahun 2020, sehingga merubah nomenklatur program dan kegiatan pada dokumen renstra yang telah tersusun. Program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 tahun 2020 telah digunakan pada tahun 2021, namun perubahan renstra baru ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2021, sehingga belum sepenuhnya bisa dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan sehingga dalam penganggaran belum sepenuhnya selaras dengan Renstra dalam merencanakan

- kegiatan sehingga benar-benar akan menghasilkan outcome yang terukur.
2. Adanya kebijakan/regulasi terkait perencanaan dan penganggaran yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk aturan pelaksanaan, sehingga terdapat beberapa program, kegiatan yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada .
 3. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas belum dilaksanakan secara optimal.

Alternatif solusinya

1. Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja dengan mewajibkan bagian-bagian dilingkungan Setda untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan PK dan melakukan reviu yang mencakup reviu tujuan dan sasaran, dengan dilengkapi IKU yang relevan, spesifik, dan terukur dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing bagian.
2. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran dilingkungan Sekretariat Daerah untuk mempedomani Perubahan Renstra Sekretariat Daerah sehingga setiap indikator dapat dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Memastikan bahwa Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja satuan kerja dan individu, pemberian penghargaan atau sanksi;

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah didukung oleh 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Program Perekonomian dan Pembangunan.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 26.035.622.244 dengan realisasi sebesar Rp. 24.997.702.068 (96.01%).

2. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik kesekretariatan daerah

Tabel 3.6
 Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik kesekretariatan daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian terhadap 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Capaian	%		
1	2	3		5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik kesekretariatan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83.77	84.00	84.16	100	85.00	99.01
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis :						100		99.01

Sumber : Bagian adminbang Sekretariat Daerah tahun 2021, data diolah,

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik kesekretariatan daerah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (*Sangat tinggi*) sedang capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2024 mencapai 99,01 % (*Sangat tinggi*).

Penunjang keberhasilan : adanya pembagian tugas pokok dan fungsi serta kejelasan pelaksanaan tugas antar bagian.

Permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan *e-office*, yang pelaksanaannya tergantung dengan aplikasi, sarana prasarana, Sumber Daya Manusia, sehingga belum bisa diaplikasikan secara menyeluruh.

Alternatif solusinya adalah dengan menerapkannya secara gradual/bertahap.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 10.602.7321858,00 dengan realisasi anggaran Rp.9.594.923.428,00 (90,49%). Survei IKM Tahun 2021 dilaksanakan pada 3 Unit Pelayanan Publik, yaitu Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Indeks Kepuasan Masyarakat secara kumulatif tahun 2021 adalah 84.16 (delapan puluh empat koma enam belas). Hal ini menunjukkan secara umum kualitas pelayanan Unit Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang masuk kategori Baik (77,61 – 88,30).

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat secara kumulatif tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) dari Indeks Kepuasan Masyarakat tahun sebelumnya (2020) yang memperoleh nilai IKM sebesar 83,77 menjadi 84,16.

C. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % (seratus persen), pada Sekretariat Daerah dari 2 (dua) sasaran kinerja dengan nilai kinerjanya 100%, dimana tingkat efisiensi masing-masing sasaran tersaji dalam tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Analisis efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.	100	96.01	3.99
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik kesekretariatan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100	90.49	9.51
Rata-rata tingkat efisiensi :					6.75

Sumber : Bagian adminbang Sekretariat Daerah tahun 2021, data diolah,

D. Prestasi

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang membuahkan hasil berupa prestasi sebagai berikut:

- Selaku Pembina BUMD, diraih :
 - PD BPR BKK Bintang 4 dalam kategori Top BUMD Awards 2021, *“EXCELLENT For The Financial During September 2019-2020 dan The Best Quality Of Regional Community Service In Microfinance Of The Year 2021.*
 - Bapas 69 Infobank Award Tahun 2021 sebagai BPR Terbaik dengan dengan predikat *“SANGAT BAGUS”* atas kinerja keuangan Tahun 2020 – 2021, *Indonesia Corporate Governance Award 2021, TOP PEMBINA BUMD - Bapak Zaenal Arifin Bupati Magelang dan beberapa kategori lainnya.*
- Piagam penghargaan Terbaik X Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi serta dalam rangka mewujudkan *good governance* pada instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun dilihat dari pemanfaatan sumberdaya termasuk didalamnya dalam pemanfaatan anggaran

P
e
n
u
t
u
p

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan kerja keras seluruh aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Sekretariat Kabupaten Magelang dan dukungan serta partisipasi masyarakat serta dan berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikannya untuk kemajuan Kabupaten Magelang.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 telah mencapai 101,00% (*Sangat Tinggi*) dibandingkan dengan target tahun 2024 pada akhir periode Renstra dengan capaian 96,07% (*Sangat Tinggi*), maka capaian tahun 2021 telah mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan. pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat Daerah didukung 4 program dengan jumlah anggaran Rp 36.638.355.102,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus dua rupiah) dan realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran strategis sebesar Rp 34.592.625.496,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) atau (94,42%), prosentasi realisasi keuangan masuk dalam katagori *Sangat baik*. Efisiensi capaian kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya

sebesar 6,75%, tetapi tingkat efisiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.

Harapan kami untuk tahun-tahun mendatang LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang selain berfungsi untuk mengukur keberhasilan dan atau kegagalan dalam menjalankan misi dan sasaran strategis organisasi, juga dapat digunakan sebagai upaya memacu usaha peningkatan kinerja dan pelayanan publik, dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki keputusan dan kebijakan dari pemerintah.

Demikian LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang yang menggambarkan capaian kinerja sasaran srategis dan indikator kinerja utama dan pada tahun 2021 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ADI WARYANTO
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP
Jabatan : BUPATI MAGELANG
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 1 Nopember 2021

PIHAK KEDUA

ZAENAL ARIFIN, S.I.P.

PIHAK PERTAMA

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19660304 199203 1 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.	72,50%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik kesekretariatan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,00 angka 1-100

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.500.925.761	Semua Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	18.859.776.390	Daerah
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	7.164.723.954	Kabupaten Magelang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.121.900	Perubahan (APBD-P) Kabupaten Magelang Tahun 2021

Jumlah : 49.536.548.005

Kota Mungkid, 1 Nopember 2021



PIHAK KEDUA

ZAENAL ARIFIN, S.IP



PIHAK PERTAMA

Drs. ADI WARYANTO

Pembina Utama Madya

NIP. 19660304 199203 1 007

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.	72,50%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik kesekretariatan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,25

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.018.881.785	Semua Kegiatan yang dilaksanakan di
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	19.921.950.200	Sekretariat Daerah Kabupaten
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	824.772.700	Magelang bersumberkan dari
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	15.000.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2021
Jumlah :		29.780.604.685	

Kota Mungkid, 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,



**PERUBAHAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target				Target Triwulan				Program	Anggaran	Keterangan
			Angka	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah	3 Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	72,50	Persen	20	35	55	72,50	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	18.859.776.390			
									Program Perekonomian dan Pembangunan	7.164.723.954			
									Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.121.900			
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik kesekretariatan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,00	-	0	0	0	84,00	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/ Kota	23.500.925.761			

Kota Mungkid, | Nopember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

